

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 88-90 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PENUTUPAN JALAN
UMUM UNTUK KEGIATAN PESTA**

(Studi pada masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

NI'MATUZ ZUHROH

NPM. 1621020315

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 88-90 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PENUTUPAN JALAN
UMUM UNTUK KEGIATAN PESTA**

(Studi pada masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

NI'MATUZ ZUHROH

NPM. 1621020315

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

ABSTRAK

Jalan adalah suatu fasilitas publik yang sangat vital bagi masyarakat. Namun disamping itu, Banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut, contohnya seperti perayaan acara resepsi pernikahan, acara kematian atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan bahwa masyarakat di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung masih banyak yang melaksanakan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi sehingga pengguna jalan yang lain kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penggunaan jalan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Izin Penutupan Jalan Umum Berdasarkan Pasal 88-90 PP Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung, dan Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung berdasarkan pasal 88-90 PP Nomor 43 Tahun 1993 dan untuk mengetahui Pandangan Fiqh siyasah terhadap Penutupan jalan Umum Untuk kegiatan Pesta.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian di olah dengan tahap editing dan sistemating.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung melaksanakan Penutupan Jalan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintahan belum di terapkan dengan baik oleh masyarakat setempat, selain itu masyarakat Jagabaya yang melakukan penutupan jalan untuk acara pesta tidak memiliki lahan lebih untuk kelangsungan acara sehingga harus menutup jalan untuk acara pestanya. Jadi menurut penulis status hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukan di jalan yang telah ditetapkan oleh Perkapolri asalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan diganti dengan adanya jalan alternatif lain. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah yaitu pelaksanaan penutupan jalan untuk kegiatan pesta diperbolehkan selama tetap mementingkan kemaslahatan masyarakat lainnya dan tidak menimbulkan kemudharatan.

PERSETUJUAN

Kami tim pembimbing telah melakukan bimbingan dan koreksi sebagaimana mestinya, terhadap skripsi saudara :

Nama : Ni'matuz Zuhroh

NPM : 1621020315

Jurusan : Siyasa

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 88-90**

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993

TENTANG PENUTUPAN JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN

PESTA (Studi pada masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung).

MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

NIP. 195707051989031001

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.H.I

NIP.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PASAL 88-90
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG
PENUTUPAN JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN PESTA** (Studi pada
masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung). Disusun oleh **Ni'matuz Zuhroh,
NPM: 1621020315, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah
diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung
pada hari/tanggal: **Jumat/19 Juni 2019**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua sidang : Dr. Jayusman, M.Ag.

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H. MH

Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**Dekan,
Fakultas Syar'iah**



Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْا إِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa ayat 59)



PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Nursamsi dan Ibunda tersayang Atikah, yang telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya Ayah dan bunda.
2. Adik-adikku tersayang Saiful Muarif, dan Muhammad Afif Abdillah yang selalu mensupport dan semangat serta penguatan mental dalam proses panjang pengerjaan skripsi ini, terimakasih selalu memberikan nasehat dan semangat selama proses belajar ini.
3. Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ni'matuz Zuhroh, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Nursamsi dan ibu Atikah yang dilahirkan di Margoyoso, 8 Juli 1998 Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Penulis memasuki Pendidikan dimulai dari :

1. Sekolah Dasar Negeri 03 Margoyoso, lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Mts Mambaul Ulum Margoyoso, lulus pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Sumberejo, lulus pada tahun 2016.
3. Pada September 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dan menyelesaikan Studi Strata Satu Hukum Tata Negara Pada Tahun 2020 dengan gelar Ni'matuz Zuhroh, S.H.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis,

Ni'matuz Zuhroh

1621020315

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 88-90 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PENUTUPAN JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN PESTA (Studi pada Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung)”.

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik dalam bimbingan dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

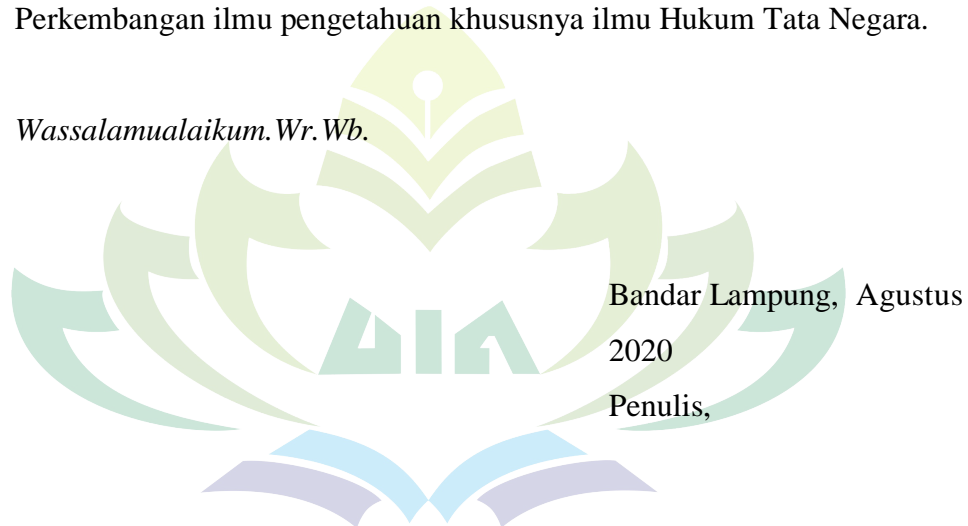
1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M.si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag dan Dr. Agus Hermanto, M.H.I masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan saran, bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas Syari'ah dan institute yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Teman Seperjuangan HTN terkhusus angkatan 2016 kelas F. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempat menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.



Bandar Lampung, Agustus
2020
Penulis,

Ni'matuz Zuhroh

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
1. Alasan Subjektif.....	3
2. Alasan Objektif.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Populasi dan Sampel.....	14
5. Metode Pengolahan Data.....	15
6. Metode Analisis Data.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Jalan.....	18
1. Pengertian Jalan	18
2. Macam-Macam Jalan.....	19
3. Pembagian Jalan Menurut Fungsinya	25
4. Perizinan Untuk Penggunaan Jalan.....	27
B. Pasal 88-90 PP No. 43 tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta.....	31
C. Pesta.....	42
1. Pengertian Pesta	42
2. Macam-Macam Pesta.....	43
3. Fungsi Pesta	45
D. Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya	46
E. Tinjauan Pustaka	51

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Kelurahan Jagabaya 1	54
1. Sejarah Singkat Kelurahan Jagabaya 1	54
2. Visi dan Misi Kelurahan Jagabaya 1	56
3. Letak Geografis.....	58
4. Keadaan Demografis.....	60
5. Struktur Organisasi Kelurahan Jagabaya 1	61
B. Pelaksanaan Izin Penutupan Jalan Umum Berdasarkan Pasal 88-90 PP Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Izin Penutupan Jalan Umum Berdasarkan Pasal 88-90 PP Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung	71
--	----

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung	72
---	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Kartu Konsultasi Skripsi
Daftar Pertanyaan Wawancara
Dokumentasi Wawancara
Surat Keterangan Wawancara
Surat Rekomendasi Penelitian
Lembar Tugastu

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta (Studi pada Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

Fiqh Siyasah merupakan gabungan dari dua kata yaitu, fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”, Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Sedangkan Siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksana. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h.58

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.³

Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh dilalui atau dimasuki.⁴

Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan), perlintasan dari suatu tempat ketempat yang lain.⁵

Pesta adalah sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. Pesta dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan muslim, atau, pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan.⁶

Berdasarkan pengertian dari keseluruhan istilah di atas maka dapat disimpulkan dan dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta (Studi pada

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2-4.

³ Zulherman Idris, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* (Jakarta: Wira Atma, 2017), h.10

⁴ *Ibid.*, h. 539

⁵ Jhon M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998), h.232

⁶ *Ibid.*, h. 115.

Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung) adalah pandangan yang mengatur hubungan antar warga negara agar terciptanya suatu aturan yang tertib dan tenang dari perkumpulan manusia yang menyalahi aturan demi keadaan serba teratur.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Penutupan Jalan umum sangatlah mengganggu pengguna jalan lain, dan masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung masih sering mengadakan acara pesta seperti pernikahan dengan cara menutup jalan tetapi pelaksanaan menutup jalan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Secara Subjektif

- a. Judul skripsi memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang di tempuh peneliti, yaitu prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syae'iyah)
- b. Daerah penelitian sangat mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori (buku-buku) atau data lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Jalan adalah suatu fasilitas publik yang sangat vital bagi masyarakat. Namun disamping itu, Banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut, contohnya seperti perayaan acara resepsi pernikahan, acara kematian atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat Indonesia pada umumnya.⁷

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu traffic light, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam Pasal1 ayat 12 dijelaskan, bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

⁷ “Ulasan Lengkap: Aturan Penggunaan Jalan Raya untuk Pesta” (On;line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk- pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/> (11 Desember 2019).

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁸

Kegiatan lalu lintas juga diatur dalam pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

Sering kali kita jumpai bahwa dengan adanya kegiatan penutupan jalan untuk kegiatan pesta yang menjadi kepentingan pribadi/perorangan, banyak masyarakat-masyarakat yang merasa sangat kesulitan apabila ingin melintas dan menimbulkan banyak kemudharatan. Kemudharatan itu timbul yang diaplikasikan dalam bentuk umpatan kepada pihak yang menyelenggarakan hajatan/pesta, apalagi jika akses jalan yang ditutup tersebut adalah jalan satu-satunya bagi masyarakat. Islam mengajarkan agar jangan sampai mengajarkan umatnya untuk menebarkan kebaikan dan menghindarkan diri dari kemudharatan.

Selanjutnya Islam menjelaskan tentang ayat yang menyangkut kepentingan orang banyak. Firman Allah SWT tentang kegiatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu: ⁹

⁸Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹ Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ٥٨

Artinya : “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. (Q.S. al-Ahzab : 58).

Dalam Islam juga diajarkan untuk tidak menyakiti sesama muslim dan dilarang membuat kemudharatan diantara sesama umat muslim. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu S Haramah r.a sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ

Artinya: “Orang-orang yang menyebabkan mudharat bagi seseorang muslim niscaya Allah akan membuat dirinya mudharat, dan orang - orang yang membuat kesulitan bagi seorang muslim niscaya Allahpun akan membuat kesulitan bagi dirinya”. (HR Abu Daud dan al-Tirmidzi)¹⁰

Adapun penutupan jalan umum untuk keperluan pesta mempunyai dampak negatif bagi masyarakat, antara lain :

1. Membuat orang banyak sulit mencapai tujuan
2. Mengakibatkan pengguna jalan tersesat tidak sampai pada tujuan
3. Mengarahkan kepada perilaku riya' dan bersaing.

¹⁰Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tirmidzi.

Sedangkan pengaruh positifnya hanya memuaskan dan meringankan beban shahibul Hajjah (Orang yang mempunyai hajat). Karena padatnya permukiman di kota-kota, banyak kita jumpai orang yang menggelar pesta di jalanan umum. Menutup akses jalan hingga banyak orang yang ingin berjalan harus memutar melewati jalan lain.¹¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa masyarakat di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung masih banyak yang melaksanakan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi sehingga pengguna jalan yang lain kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penggunaan jalan. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait pelaksanaan penutupan jalan umum berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, karena dengan pelaksanaan penutupan jalan di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung banyak yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat yang lain merasa terganggu dengan pelaksanaan penutupan jalan tersebut, karena masyarakat yang lain juga mempunyai hak untuk menggunakan jalan umum untuk lalu lintas.

Maka dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin membahas penelitian ini dengan judul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum

¹¹ Fatwa MUI Lampung, 26 Desember 2010., h.2

Untuk Kegiatan Pesta (Studi pada Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan. Sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai " Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta (Studi pada Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung)".

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai bagaimana pelaksanaan izin penutupan jalan berdasarkan pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung, dan mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta secara lebih mendalam lagi.

E. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Izin Penutupan Jalan Umum Berdasarkan Pasal 88-90 PP Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung.
 - b. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta.

G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta berdasarkan pasal 88-90 PP Nomor 43 tahun 1993 di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang dibidang hukum Islam.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta (Studi pada Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh dalam lingkungan sosial, dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Alasannya karena penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta berdasarkan PP di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung berdasarkan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna akan lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis, adapun langkah-langkah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹³ Penelitian *deskriptif analisis* ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya. Dalam kaitan ini, penelitian ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta (Studi pada Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung).

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intang Lampung, 2015), h. 10

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber bahan Hukum primer

Sumber bahan Hukum Primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴

Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini diantaranya riset lapangan (field research), yaitu data tentang Pelaksanaan Izin Penutupan Jalan Umum berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1993 di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung.

b. Sumber bahan Hukum sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya.¹⁵ Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab fiqh, buku-buku, artikel, jurnal dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Cet. Ke-4*, Bandung: Alfabeta, , 2008, h.2.

¹⁵ Louis Gootschik, *Understanding History, Apiori of Historycal* terjemahan Nugroho Nota Sumanto,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), h. 98.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Penelitian ini menelaah karya tulis, buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.¹⁶ Tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kekurangan bahkan kehilangan informasi yang hanya dapat didapatkan melalui jalur tersebut.

Adapun responden yang akan di wawancara akan diminta keterangan dan data adalah warga yang mewakili populasi yaitu masyarakat tetap yang sudah lama tinggal di Jagabaya Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.158

c. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pencatatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁷ Maka dalam penelitian ini dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung. Seperti sejak kapan pelaksanaan penutupan jalan berdasarkan PP.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti.¹⁸ Pendapat lain mengatakan populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki tersebut populasi atau unipersum, populasi ini dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama.¹⁹

Dengan demikian Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung berjumlah 641 Kepala Keluarga dari 11 RT.

¹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Riserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h. 115.

¹⁸ Wardi Bachtiar, *Metedologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), h.6

¹⁹ Sudjana, *Metode Stastik*, (Bandung:Tarsito, 1989), h.6

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.²⁰

Dalam penelitian ini, tidak semua hanya beberapa saja masyarakat yang dijadikan sampel, yaitu sekitar enam orang, hal ini dilakukan karena untuk meminimalisir biaya maka dari itu peneliti tidak mengambil semua. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non random sampling sedangkan teknik non random yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk menjadi anggota sampel.²¹

5. Metode Pengelolaan Data

a. Editing

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: (1) Keseuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan (2) Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan (3) Keajegan (consistency) jawaban responden.

b. Pengkodean (coding)

Pengkodean dapat dilakukan dengan member tanda atau (simbol) yang berupa angka pada jawaban responden yang diterima. Tujuan pengkodean adalah untuk penyederhanaan jawaban responden. Harus

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.104

²¹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Search Jilid 1* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h.80

diperhatikan pula pemberian dalam jenis pertanyaan yang diajukan (pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup).²²

c. Rekontruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

d. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Untuk menganalisa data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual. Dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

Peneliti juga menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu

²²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1993), h.31.

pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²³ Dengan demikian studi kasus ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada suatu kejadian, sehingga mendapat gambaran yang luas dari subjek yang diteliti.



²³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), h.38

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Jalan

1. Pengertian Jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jalan adalah suatu tempat yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan masyarakat, perlintasan dari suatu tempat ketempat yang lain. Dalam bahasa Inggris kata Jalan disebut dengan istilah *road and street*.²⁴

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 ayat (4) yaitu, secara terminologi bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

²⁴ Jhon M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h.232.

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1.

2. Macam- Macam Jalan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan:

1. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan Provinsi, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di Kota.

5. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukaan di dalam desa, serta jalan lingkungan.²⁶

Sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat (Clarkson H.Oglesby, 1999).

Untuk perencanaan jalan raya yang baik, bentuk geometriknya harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga jalan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada lalu lintas sesuai dengan fungsinya, sebab tujuan akhir dari perencanaan geometric ini adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan ratio tingkat penggunaan biaya juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.²⁷

Sejarah perkembangan jalan raya yang pada mulanya dari berupa bekas jejak berubah menjadi jalan raya modern. Jalan dibuat karena manusia perlu bergerak dan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jejak jalan tersebut berfungsi sebagai

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1.

²⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 1

penuntun arah dan menjadikan jejak jalan semakin melebar dikarenakan sering berpindah-pindahannya mereka. Kemudian kurang lebih 5000 tahun yang lalu, manusia hidup berkelompok, untuk keperluan tukar menukar barang pokok mereka mulai menggunakan jalur jalan secara tetap yang berfungsi sebagai jalan prasarana sosial. Dari sejarah perkembangan peradaban manusia dan dari berbagai penemuan para pakar transportasi tentang sejarah perkembangan jalan dapatlah diketahui bahwa:²⁸

1. Jalan yang pertama yang menggunakan 3500 SM. Penemuan ini perkerasan ditemukan di daerah Mesopotamia dipandang sebagai awal dari sejarah keberadaan jalan raya.
2. Konstruksi jalan yang terdiri dari tanah asli dilapisi dengan batu kapur dan ditutup dengan batu bata ditemukan di antara Babilonia hingga Mesir yang diperkirakan dibangun 2500-2568 SM oleh raja Cheope yang berfungsi untuk mengangkut batu-batu besar dalam membangun Great Pyramid.
3. Permukaan jalan diperkeras dari batu-batuan ini ditemukan di pulau Kreta (Kreta) Yunani yang dibuat kurang lebih 1500 SM.
4. Di wilayah Babilonia ditemukan permukaan jalan yang dibuat berlapis-lapis yaitu dari lapisan tanah dasar yang di atasnya disusun lapisan batu-batu besar, batu berongga dicampur mortar, batu kerikil dan kemudian ditutup dengan batu Plat. Menuju jalan modern pada masa Kekaisaran Romawi yang

²⁸“*Sejarah Jalan Raya*” (Online), tersedia di: [https:// www.indonesiana.id/read/125396/sejarah-jalan-raya-di-indonesia](https://www.indonesiana.id/read/125396/sejarah-jalan-raya-di-indonesia) (23 maret 2020).

mengalami kejayaan dalam membangun jalan pada tahun 753-476 SM. Hal tersebut berdasarkan atas berbagai penemuan antara lain:²⁹

- a. Penemuan danau aspal Trinidad oleh Sir Waller Religh Tahun 1595, dimana dengan bahan temuan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkeras lapisan permukaan jalan.
- b. Metode perinsip desak diperkenalkan oleh orang Scotlandia yaitu pada tahun 1790 yaitu Thomas Telford, yaitu suatu kontruksi perkerasan jalan yang dibuat menurut jembatan lengkung dari batu belah, serta menambahkan susunan batu.
- c. Tahun 1815 Jhon london Mc adams memperkenalkan prinsip tumpang tindih atau kontruksi makadam. Penemuan mesin penggilas (stom roller) ditemukan tahun 1860 oleh Lemoine.

Jalan raya juga bisa diartikan sebagai jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai cirri-ciri berikut:

1. Digunakan untuk kendaraan bermotor
2. Digunakan oleh masyarakat umum
3. Dibiayai oleh perusahaan negara
4. Penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan

²⁹*Ibid.*

Tidak semua jalan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor itu jalan raya. Contohnya lintasan-lintasan di daerah perkebunan. Di Malaysia jalan raya yang sah haruslah diumumkan oleh pihak yang berkuasa.

Awal perkembangan jalan diberbagai wilayah secara umum masih merupakan jalan setapak atau jalan tanah. Peradaban-peradaban kuno yang telah berhasil membangun teknologi jalan yang lebih modern diantaranya Tiongkok, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi. Modern ini bisa dapat diartikan bahwa jalan tersebut tidak hanya dapat dilintasi dengan berjalan kaki, tetapi juga dapat dilewati kendaraan beroda yang ditarik dengan kuda. Hal ini disebabkan peradaban tersebut sudah mengembangkan teknik pemadatan pada pembangunan jalan, sehingga struktur jalan menjadi lebih kuat.

Bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan.

- a. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- b. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- c. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu diluar tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaanya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Ruang Pengawasan jalan diperuntukkan bagi

pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.³⁰

Perkembangan jalan dalam peradaban manusia, jalan raya yang pada hakikatnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dibangun seiring dengan keberadaan manusia sendiri. Jalan pada awalnya hanya berupa jejak manusia yang berkeliling ke daerah sekitar untuk mencari kebutuhan hidup. Jejak ini berfungsi sebagai penuntun arah bagi manusia.

Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, manusia melakukan aktivitas untuk mempertahankan hidupnya secara berkelompok. Perpindahan secara berkelompok ini kemudian menghasilkan jejak-jejak dengan jumlah yang lebih banyak. Selain itu, jalan yang juga berfungsi sebagai petunjuk arah membuat jejak-jejak kaki lebih sering dilalui oleh orang, sehingga jejak-jejak kaki ini kemudian berubah menjadi jalan setapak, yang belum rata.

Pada dasarnya di era sekarang pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowong, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan (ini mungkin melibatkan penebasan hutan). Berbagai macam jenis mesin pembangun jalan akan digunakan untuk proses ini. Jalan raya ialah jalur-jalur diatas permukaan bumi

³⁰ J M Bemmelen, *Jalan dan Peraturan Lalu Lintas Umum*, (Bandung : Binacipta, 1987), h.17

yang sengaja dibuat oleh manusia dengan ukuran, konstruksi dan bentuk tertentu sehingga dapat dipakai sebagai jalur lalu lintas orang, hewan dan kendaraan.³¹

Muka bumi harus di uji untuk melihat keampuannya untuk menampung beban kendaraan. Berikutnya, jika perlu, tanah yang lembut akan diganti dengan tanah yang lebih keras. Lapisan tanah ini akan menjadi lapisan dasar. Seterusnya diatas lapisan dasar ini akan dilapisi dengan satu lapisan lagi yang disebut lapisan permukaan. Biasanya lapisan permukaan dibuat dengan aspal ataupun semen.

Pengaliran air merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pembangunan jalan raya. Air yang berkumpul dipermukaan jalan raya setelah hujan tidak hanya membahayakan pengguna jalan raya, malahan akan mengikis dan merusak struktur jalan raya. Karena itu permukaan jalan raya sebenarnya tidak betul-betul rata, sebaliknya mempunyai landaian yang berarah ke selokan dipinggir jalan. Dengan demikian, air hujan akan mengalir kembali ke selokan.³²

3. Pembagian Jalan Menurut Fungsinya

Pembagian jalan menurut fungsinya atau hierarki jalan adalah pengelompokkan jalan berdasarkan fungsi jalan, berdasarkan administrasi pemerintahan dan berdasarkan muatan sumbu yang menyangkut dimensi dan

³¹ *Pengelompokan jalan*” (On;line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengelompokan_jalan (24 maret 2020).

³² *Ibid.*,

berat kendaraan. Penentuan klasifikasi jalan terkait dengan besarnya volume lalu lintas yang menggunakan jalan tersebut, besarnya kapasitas jalan, keekonomian dari jalan tersebut serta pembiayaan pembangunan dan perawatan jalan.

Klasifikasi jalan fungsional di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah:³³

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ayat 1-6 Yaitu Tentang:

1. Jalan umum menurut Fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
2. Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
3. Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
4. Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

³³Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 1-6

5. Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.³⁴

Jadi yang dimaksud dengan pengelompokkan jalan yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum.

4. Perizinan untuk Penggunaan Jalan

Penggunaan jalan untuk pesta termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan Kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif lain. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

³⁴ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 1-6

Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:³⁵

1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi
2. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota
3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:³⁶

1. Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan
2. Waktu penyelenggaraan
3. Jenis kegiatan
4. Perkiraan jumlah peserta
5. Peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan, dan
6. Surat rekomendasi dari:
 - a. Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi

³⁵ Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 2

³⁶ Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 3

- b. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota;atau
- c. Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.

Khusus bagi penggunaan jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri, tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana disebutkan dalam persyaratan diatas.

Jadi, pada dasarnya seseorang dapat mengadakan pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya selama dia telah mendapatkan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Adapun saat pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebiasaan lebih mudah , artinya jika jumlah pengunjung dan kelas kegiatannya hanya kelas kecamatan, biasanya cukup ke Polsek saja, kecuali ada ketentuan lain dan untuk penutupan jalan didepan Masjid atau tempat ibadah lainnya diharuskan membuat surat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Rekomendasi Penutupan Jalan Kepada KADISHUB
2. Surat Permohonan Izin Penutupan Jalan Kepada KAPOLRES tembusan ke KAPOLSEK dilampirkan Surat Rekomendasi DISHUB.

Dijalan juga kita harus mempunyai tatakrama terhadap sesama pengguna jalan. Seseorang dianggap bertata krama dalam melakukan suatu perjalanan, apabila tatkala ia menggunakan jalan umum atau jalan raya, ia menaati undang-

undang dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Misalnya saja:

1. Pejalan kaki hendaknya:

- a. Berjalan disebelah kiri jalan dan di trotoar
- b. Menyebrang di jembatan penyebrangan atau di zebra cross
- c. Menunggu lampu hijau penyebrang atau menunggu saat yang aman ketika hendak menyebrang
- d. Menjaga sopan santun.

Penutupan jalan memang di izinkan namun wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Akan tetapi, dibolehkannya oleh UU bukan berarti tata etika dan keselamatan di jalan raya diabaikan begitu saja. Syarat-syarat penutupan jalan itu adalah:³⁷

1. Penggunaan jalan diluar peruntukannya dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
2. Penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Penutupan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi jelas melanggar aturan. Konsekuensi hukum dari penggunaan jalan diluar peruntukannya secara melawan hukum tersebut adalah pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana melanggar pasal 274 ayat (1) dan pasal 279

³⁷ Artikel www.Yufidia.com, diakses tanggal 25/3/2020

UU LLAJ dengan ancaman satu tahun penjara. Secara perdata dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum, vide Pasal 1365 KUH Perdata. Jika penutupan jalan melawan hukum tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, maka dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia (pasal 359 KUHP) dengan ancaman pidana lima tahun penjara.

3. Penutupan jalan kota/kabupaten dan jalan desa dapat di izinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi seperti resepsi pernikahan hanya mungkin di izinkan pada jalan kota/kabupaten dan jalan desa.
4. Pelaksanaan pengalihan lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
5. Mengajukan permohonan izin penggunaan jalan diluar peruntukannya.³⁸

B. Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah Pasal 127 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan

³⁸ *Ibid.*

Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Kegiatan lalu lintas juga diatur dalam pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

Bunyi peraturan pemerintah tersebut sebagai berikut:³⁹

Pasal 88

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dalam menggunakan jalan dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota madya dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diizinkan untuk kepentingan nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten, kota madya atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diizinkan untuk kepentingan umum untuk yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi.

Pasal 89

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternative yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (3) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan jalan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang

³⁹ Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

member izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 90

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 2 dan ayat 3 diberikan oleh menteri
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diatur dalam keputusan menteri.

Pada Pasal 1 ayat 9 Perkapolri Nomor 22 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Sementara itu di dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas terbagi atas 2 bagian⁴⁰ yaitu:

- a. Penggunaan jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan:
 - 1) Kegiatan Keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan dan ritual keagamaan

⁴⁰ Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 16

- 2) Kegiatan Kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan
 - 3) Kegiatan Olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional dan internasional; dan
 - 4) Kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukkan, pentas dan pagelaran.
- b. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Penutupan jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan yang bersifat pribadi terbagi atas 2 bagian yaitu:

- 1) Penggunaan jalan tanpa penutupan. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, maka pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau POLRI memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.⁴¹
- 2) Penggunaan jalan dengan penutupan. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada Kapolda setempat,

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 89 ayat 3

Kapolres/Kapolresta setempat, Kapolsek/Kapolsekta setempat, atau seperti yang tertera dalam pasal 17 ayat (2) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan yang sesuai dengan pasal 17 ayat (3) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.

Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.⁴² Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan jalan untuk pernikahan adalah termasuk dalam penggunaan untuk kepentingan pribadi, yang sah-sah saja dilakukan apabila telah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ada jalan alternatif.

Masyarakat yang menggunakan badan jalan secara penuh untuk kepentingan pribadi seperti pesta pernikahan bisa dipidanakan, jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena pada dasarnya pemerintah daerah hanya mengizinkan sebagian badan jalan untuk kepentingan pribadi seperti hajatan.

Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan

⁴² Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 2

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 1 ayat 12

alternatif yang memiliki kelas jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara⁴⁴

Berdasarkan Pasal 4 keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, alat pembatas kecepatan ditempatkan pada jalan di lingkungan pemukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C, dan pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi. Bentuk Kontruksi alat pembatas kecepatan pun di atur pada Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang berbunyi:

- a. Bentuk penumpang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol diatas badan jalan maksimum 12 cm.
- b. Penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.
- c. Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15cm.
- d. Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam lampiran gambar keputusan ini.

Salah satu contoh kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dan dengan menutup jalan adalah mengadakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai

⁴⁴ Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 3

penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”), penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.

Selain diatur dalam Perkapolri 10/2012, mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas juga diatur dalam Pasal 88- Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Sementara itu, di dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan mengenai tanggung jawab yang dibebankan terkait dengan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

- a. Penggunaan Jalan diluar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- b. Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁵

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat dipermudah untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Namun disamping

⁴⁵ Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 3

itu, banyak sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Salah satunya adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan milik jalan.

Sehubungan banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. Padahal, untuk hal ini telah ada peraturan yang mengikatnya, sebagaimana yang tercantum pada pasal 12 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan.⁴⁶

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidanakan dengan pidana

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti 1996) h. 117

penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.⁴⁷

2. Definisi Izin

Izin merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁴⁸

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴⁹

Selain itu izin juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.⁵⁰

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 3

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h.2

⁵⁰ *Ibid.*, h.2-3

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari⁵¹:

- a. Larangan
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu⁵²:

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*Relaxtion legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang

⁵¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009). h.17-18.

⁵² Ridwa HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.196-197

memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

- c. Konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi pemerintah, yaitu untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban, dan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari sisi masyarakatnya yaitu untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya hak, dan untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikatkan

tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.⁵³

Proses perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, yaitu instansi mana, bias pemerintah daerah atau pusat.⁵⁴

C. Pesta

1. Pengertian Pesta

Pesta adalah sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. "Pesta" dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, atau, pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan.

Pesta merupakan kesempatan untuk berbagai interaksi sosial, tergantung pada pesertanya dan pemahaman mereka tentang perilaku yang dianggap layak untuk acara tersebut. Akibatnya, pesta cenderung memperkuat standar budaya

⁵³ "Apa Arti Perizinan Motif dan Tujuan" (On;line), tersedia di <https://medium.com/@henroidolapane/> di akses Minggu 18 Oktober 2020

⁵⁴ *Ibid.*

dan/ atau kontra-budaya, meskipun hal ini kadang-kadang dilakukan dengan sekedar memberikan konteks sosial yang lebih kurang dapat diterima untuk pelanggaran standar-standar tersebut.

Pesta juga dapat di artikan dengan sebuah perayaan untuk memperingati kejadian atau peristiwa tertentu dengan suasana yang bahagia dan meriah dengan ditemani makanan dan minuman (sesuai jenis acaranya) serta susunan acara yang sesuai dengan kreatifitas panitia. ada pesta yang diadakan secara mewah, sederhana, dan tradisional. tamu akan diundang sebelum acara pada hari H dengan menyebar undangan secara lisan maupun tertulis.⁵⁵

2. **Macam-Macam Pesta**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbiasa dengan pesta. Berbagai macam pesta diselenggarakan dengan suka cita oleh warga masyarakat di berbagai wilayah penjurusan tanah air. Pesta adalah suatu perayaan dengan perjamuan makan minum dengan suasana yang penuh suka ria, baik untuk merayakan sesuatu hal maupun hanya sekedar bersenang-senang saja dengan banyak orang. Namun sesuatu yang dikatakan dengan istilah pesta tidak selalu merupakan acara perayaan dengan sajian makanan dan minuman, namun bias juga suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang.

⁵⁵Efi Sugiati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Musik Elektone*, Universitas Muhammadiyah Makasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017

Macam-macam/ Jenis-jenis pesta yang di adakan oleh orang Indonesia secara umum:⁵⁶

1. Pesta Ulang Tahun
2. Pesta Perkawinan
3. Pesta Ulang Tahun Perkawinan
4. Pesta Perpisahan
5. Pesta Tahun Baru
6. Pesta perayaan hari Raya Keagamaan
7. Pesta Syukuran
8. Pesta Kelahiran
9. Pesta Pertunangan
10. Pesta Reuni
11. Pesta Rakyat
12. Pesta Demokrasi
13. Pesta Panen
14. Pesta Dansa
15. Pesta Olahraga
16. Pesta Khitanan Anak

Pada Waktu-waktu tertentu biasanya banyak penyelenggaraan pesta tertentu yang sejenis. Misalnya seperti pesta pernikahan yang banyak di adakan

⁵⁶“Berbagai Jenis macam Pesta atau Resepsi Orang Indonesia” (On;line), tersedia di: <http://www.organisasi.org/1970/01/berbagai-jenis-macam-pesta-atau-resepsi-orang-indonesia.html?m=1#.X5bLexYj-Ec> di akses pada 26 Oktober 2020

pada bulan-bulan islam tertentu seperti bulan syawal, dzulhijah, dan lain-lain. Pesta pernikahan yang biasanya diadakan pada akhir tahun ajaran pendidikan sekolah dan perkuliahan.

Tidak semua pesta merupakan pesta yang baik, terdapat pesta-pesta yang umumnya dilakukan oleh orang Indonesia yang tidak baik, contohnya seperti pesta narkoba, pesta judi, pesta minum-minuman keras (miras), pesta kelulusan siswa-siswi dengan melakukan aksi-aksi yang melanggar ketertiban umum dan juga hukum. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang merupakan pesta yang diselenggarakan dengan itikad tujuan yang tidak baik.

3. Fungsi Pesta

Dalam Hukum Islam, hukumnya haram jika merayakan sesuatu dengan cara yang berlebihan. Namun menurut masyarakat sendiri memandang sisi psikologisnya, hukumnya sah-sah saja jika perayaan atau pesta itu positif dan memberikan dampak yang lebih positif. Mungkin dengan perayaan pesta tersebut seseorang lebih termotivasi untuk menjadi individu yang lebih baik. Perayaan pesta dapat berdampak dimulainya sebuah intropeksi. Ketika seseorang sedang merayakan sesuatu bias saja seseorang tersebut merasa perayaan pesta ini tidak boleh sia-sia dan arena dalam perayaan pesta banyak orang yang menyaksikan, maka secara tidak langsung hal itu akan mendatangkan pemikiran untuk member dampak baik pada perayaan seperti berubah menjadi individu yang lebih baik.

Fungsi dari perayaan pesta yaitu memperingati hari berharganya seseorang, Mensyukuri karunia yang telah diberikan oleh Tuhan, dan membuat hari di perayaan pesta tersebut menjadi bermakna.⁵⁷

D. Penerapan Hukum Islam Di Jalan Raya

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan syarat tidak bertentangan dengan Nash. Sekh Abdurrahman Taj mendefenisikan sebagai berikut: "Hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan jiwa syariat, sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kully*) serta (dapat) merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili dan juz'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Taj kemudian membedakan antara *siyasah syar'iyah* dengan *siyasah wadh'iyah*. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama Islam, guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudhratan. Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana

⁵⁷"*Fungsi Perayaan Tahun Baru*" (On;line) tersedia di: https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/szain.brin/fungsi-perayaan-tahun-baru_551b7a89a33311e621b65f7e di akses pada 27 Oktober 2020

peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari atau bertumpu pada *urf* (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan wahyu atau sumber hukum Islam.⁵⁸

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin muslim baik ada atau tiada dalilnya, baik sumbernya dari nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan Islami.

Contoh praktis: kita tidak bisa menolak aturan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah tentang Prasarana dan Lalu Lintas itu, salah satunya menutup jalan umum untuk kegiatan pesta dapat di izinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Meski aturan lalu lintas ini dikeluarkan oleh pemimpin yang kita anggap kafir sekalipun, kita harus mentaatinya. Kalau tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan fatal. Hal ini sebagaimana Hadist Nabi SAW yang berbunyi:

عن عبادة ابن الشامت رضي الله عنه انه قال بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا تُنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ (رواه البخارى مسلم)

⁵⁸Abdurrahman taj,*as-siyasah asy-syar'iyah wa al-fiqh al-islami* (mesir:dar at-fa'lif,1935)
Lihat jurnal <https://> oleh Gus Nadirsyah Hosen. netsyariah tentang Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya, diakses Minggu 18 Oktober 2020

“Kami membaiaat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah.” (HR. Bukhari 7199 dan Muslim 1709).⁵⁹

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara tidak langsung diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu’ul Aadam al Islamiyah* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia *Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Qur’an dan Sunnah* yaitu:⁶⁰

1. Niat yang benar, yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
2. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kaki kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa.
3. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan, Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur’an Surah AL-Israa’ ayat 37 “dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”.

⁵⁹Taat Lalu Lintas Termasuk Ibadah, (On;line), tersedia di: [https:// konsultasisyariah. Com /22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html](https://konsultasisyariah.Com/22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html) di akses pada 28 Oktober 2020

⁶⁰ S, Yuwono, Jurnal , *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, [https:// publikasi ilmiah .ums.ac.id](https://publikasi.ilmiah.ums.ac.id). Minggu 18 Oktober 2020.

4. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
5. Tidak menoleh ke belakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir, serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
6. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan Allah SWT.
7. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan Nabi SAW.
8. Menghindari cara berjalan yang tercela yaitu berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetaran, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburuburu dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat.
9. Tidak berjalan dengan satu sandal.
10. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda tawadhu dihadapan Allah SWT. Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang dapat menyakiti kedua telapak kaki.⁶¹

Ulama lainnya, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam al Wathan menyebutkan 9 etika di jalan sebagai berikut yaitu:

1. Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

⁶¹ *Ibid.*, Hal.76

2. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak sombong disaat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabbur.
3. Menjawab salam dari orang yang dikenal maupun orang yang tak dikenal.
4. Beramar ma'ruf dan nahi munkar.
5. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
6. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada suatu ketika Nabi SAW pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan wanita di jalanan , maka ia bersabda kepada wanita: “meminggirlah kalian, kalian tidak berhak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan.
7. Tidak ngebut bila mengendarai mobil khususnya di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong di dalam kebajikan.
8. Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan, dan tidak membuang air besar atau kecil ditempat yang dijadikan tempat bernaung.
9. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Adab-adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti adab larangan berjalan

dengan angkuh. Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan ujub terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dari sifat mukmin yang *tawadhu'* (rendah hati), *al istikanah* (tenang), *al kibr* (tidak sombong) dan *al ghatthrasah* (tidak menonjolkan diri).

Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58 yaitu:⁶²

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ زَمَّا أَكْثَرُ قَدْ
 أَحْصَوْا لَهُمْ نَارًا وَأَوَّاتٌ مِّمَّا مُمِئًا

“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”.

E. Tinjauan Pustaka

Sejarah pengetahuan penulis hingga saat ini, telah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta. Untuk itu penulis dalam melakukan penelitian,

⁶² Muawiyah, *Hukum Melanggar Peraturan Lalu Lintas, Dalam Al-Atsariyyah.Com, (2012)*
 Diakses Pada Selasa 2 Juli 2019 Di [Http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html](http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html).

maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan pada objek bahasan ini.

Melta Afrillya 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Provinsi Lampung Nomor KEP-004/MUI-LPG/KF/VIII/2010 Tentang Hukum Menutup Jalan Uum Untuk Kegiatan Pesta”. Peneliti ini lebih fokus kepada Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI Lampung Tentang Hukum Menutup Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta, Menyesuaikan fatwa tersebut dengan Maqosyid Syariah. Sedangkan Karya Ilmiah yang Penulis teliti lebih berfokus terhadap Analisis Fiqh Siyasah terhadap Penutupan Jalan Umum untuk kegiatan pesta berdasarkan PP dan melihat pelaksanaan nya di Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung.⁶³

Muhammad Hisyamsyah Dani 2019, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, “Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Peneliti ini lebih fokus kepada Penerapan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap keperluan hajatan yang dikaitkan dengan fatwa MUI Sumatera Utara tentang Hukum menutup Jalan untuk Keperluan Hajatan.

⁶³ Melta Afrillya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Provinsi Lampung Nomor KEP-004/MUI-LPG/KF/VIII/2010 Tentang Hukum Menutup Jalan Uum Untuk Kegiatan Pesta*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Sedangkan Karya Ilmiah yang penulis angkat lebih berfokus pada Pelaksanaan penutupan jalan umum untuk Kegiatan Pesta. Karena di Masyarakat Jagabaya 1 masih banyak yang melakukan pelanggaran tersebut dengan menutup jalan umum untuk keperluan pribadi dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dan warga masyarakat di Jagabaya 1 tersebut yang tidak bersangkutan merasa terganggu dengan acara tersebut dan menjadi kesulitan untuk melintasi jalan dan sulit untuk mencapai tujuan yang akan dituju.⁶⁴

Suci Indrawati 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, “Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi di Kota Makasar” Peneliti ini lebih berfokus kepada Pelaksanaan Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Kota Makasar serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan.

Sedangkan Karya Ilmiah yang penulis angkat lebih berfokus pada Pelaksanaan Penutupan Jalan umum untuk kegiatan pesta berdasarkan pasal 80-99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 1993 dan melihat Pelaksanaan penutupan jalan menurut pandangan fiqh siyasah.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Hisyam Dani, *Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019

⁶⁵ Suci Indrawati, *Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi di Kota Makasar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Zulherman Idris, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* (Jakarta: Wira Atma, 2017)
- M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998)
- Fatwa MUI Lampung, 26 Desember 2010
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intang Lampung, 2015)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Cet. Ke-4*, Bandung: Alfabeta, , 2008
- Louis Gootschik, *Understanding History, Apiori of Historycal terjemahan Nugroho Nota Sumanto*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Nasution, *Metode Penelitian Riserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996)
- Wardi Bachtiar, *Metedologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997)
- Sudjana, *Metode Stastik*, (Bandung: Tarsito, 1989)

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Search Jilid 1* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1993)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet, Ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- H.A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran; Sejarah Dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat* (Jakarta: 1994)
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006)
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyash al-Syar'iyat fi Islam al Ra'iyat, Dar Al-Kutub Al- Arabiyat* (Beirut, 1996)
- Abdul Wahhab Khallaf, *asl-Siyash al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyash Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp.)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash* (Jakarta: Kencana, 2017)

Dr. J. Suyuthi Pulungan, *M.A. Fiqh Siyasa Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993)

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti 1996)

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993)

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009).

Ridwa HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 16

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 89 ayat 3

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 2

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 1 ayat 12

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 3

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 3

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 3

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 2

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 3

Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 58

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Di Ponegoro, 2015)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012)

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984)

HADIST

Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tirmidzi.

INTERNET

“*Ulasan Lengkap: Aturan Penggunaan Jalan Raya untuk Pesta*” (On;line), tersedia

di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk- pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/>

Muawiyah, *Hukum Melanggar Peraturan Lalu Lintas, Dalam Al-Atsariyyah.Com*, (2012)

Diakses Pada Selasa 2 Juli 2019 Di [Http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html](http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html).

Apa Arti Perizinan Motif dan Tujuan” (On;line), tersedia di [https://medium.com](https://medium.com/@henroidolapane/)

[/@henroidolapane/](https://medium.com/@henroidolapane/)

Artikel www.Yufidia.com

“Sejarah Jagabaya 1 Bandar Lampung” (On;line), tersedia di : <http://jagabaya-bandarlampung.or.id/2016/06/27/906>

JURNAL

Abdurrahman taj,*as-siyasah asy-syar'iyah wa al-fiqh al-islami* (mesir:dar at-fa'lif,1935)

Lihat jurnal <https://> oleh Gus Nadirsyah Hosen. netsyariah tentang Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya

S, Yuwono, Jurnal , Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam, <https://> publikasi ilmiah .ums.ac.id.

Melta Afrillya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Provinsi Lampung Nomor KEP-004/MUI-LPG/KF/VIII/2010 Tentang Hukum Menutup Jalan Uum Untuk Kegiatan Pesta*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Muhammad Hisyam Dani, *Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019

WAWANCARA

Rohimah, wawancara dengan penulis, Jagabaya I Bandar Lampung, 10 juni 2020.

Reza Agustina, wawancara dengan penulis, Jagabaya I Bandar Lampung, 10 Juni 2020.

M.Nazal Wibowo, wawancara dengan penulis, Jagabaya I Bandar Lampung, 10 Juni 2020.

Ibrahim Hasan, wawancara dengan penulis, Jagabaya I Bandar Lampung, 10 Juni 2020.

Ahmad Hendra, wawancara dengan penulis, Jagabaya I Bandar Lampung, 10 Juni 2020.

Herawati, wawancara dengan penulis, Jagabaya I Bandar Lampung, 10 Juni 2020.

